



RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TRIWULAN II

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PESISIR SELATAN



PAINAN
2023

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberi kekuatan sehingga dokumen Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Triwulan II Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Evaluasi dan pengendalian terhadap hasil RKPD untuk Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dilakukan terhadap 6 Program dimana 1 (satu) Program Urusan Penunjang Pemerintahan Kab/Kota dan 5 (Lima) Program Prioritas yang dilaksanakan oleh pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan melalui 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/ kegiatan dalam penyelenggaraan urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan daerah kita, terimakasih.

Billahhi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, Juli 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan,



HARDI DARMA PUTRA, S.H, M.Si
NIP. 19670901 198602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.2 Maksud dan Tujuan	5
1.3 Metodologi	6
BAB II CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/KEGIATAN RKPD DAN KENDALA	7
1. Prog. Urusan Penunjang Pemerintahan Kab/Kota	7
2. Prog. Ideologi Pancasila & Karakter Kabangsaan	7
3. Prog. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8
4. Prog. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8
5. Prog. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Konflik Sosial	9
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	10
3.1 Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023	10
3.2 Rekomendasi.....	11
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Pelaksanaan Triwulan II Tahun Anggaran 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD yang tersebar dalam Renja-PD dan sehingga keselarasan antara APBD pelaksanaannya dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan untuk perencanaan selanjutnya.

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2023 ini, didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2023, dalam mengevaluasi fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2023.

1.1 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah dan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Tengah jo Undang-Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klafikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemuktahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perengakat;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Evaluasi terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, dengan tujuan untuk:

- a. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Triwulan II tahun 2023.
- b. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD triwulan II tahun 2023 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2023.
- c. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Triwulan II Tahun 2023.
- d. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Triwulan II tahun 2023.
- e. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.
- f. Merumuskan bahan analisis dalam penyusunan RKPD

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, dan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023.

- g. Menjamin konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- h. Menjamin konsistensi antara perencanaan daerah dengan perencanaan Nasional serta dengan rencana tata ruang Daerah dan Nasional.
- i. Menjamin terciptanya konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
- j. Menjamin konsistensi antara Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

1.3. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan Evaluasi terhadap Hasil RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan Renja-PD dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan terget rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	$91 \% \leq 100 \%$
2	Tinggi	T	$76 \% \leq 90 \%$
3	Sedang	S	$66 \% \leq 75 \%$
4	Rendah	R	$51 \% \leq 65 \%$
5	Sangat Rendah	SR	$\leq 50 \%$

Sumber rujukan: Permendagri 86/2017

BAB II
CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA
PROGRAM / KEGIATAN RKPD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan melalui 7 Kegiatan dengan 18 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, dengan anggaran sebesar Rp.3.310.907.101,- realisasi keuangan sampai triwulan II mencapai Rp.1.696.866.616,- (51,25%). Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 75% (sedang).

Tingginya capaian kinerja dan keuangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena rata rata kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang rutin dilakukan.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Penyelenggaraan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilakukan melalui 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama. Untuk tahun anggaran 2023 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama tidak memiliki anggran (Rp.0,-). Pada Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan capaian kinerja sampai triwulan II adalah sebesar 73,6% (sedang). Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional yang ditargetkan sebanyak 24 Upacara hari besar Nasional dan terlaksana sampai dengan triwulan II ini adalah sebanyak 6 Upacara dengan capaian kinerja 73,6% (sedang).

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Penyelenggaraan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama. Untuk tahun anggaran 2023 Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama tidak memiliki anggaran (Rp.0,-). Pada Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya capaian kinerja 73,33% (sedang). Dalam pencapaian kinerja pada program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan Polres Pesisir Selatan (Sat Narkoba) Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Damkar untuk kasus kenakalan remaja.

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Penyelenggaraan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan. Untuk anggaran tahun 2023 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tidak memiliki anggaran (Rp.0,-) dengan capaian kinerja sebesar 25% (rendah).

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Penyelenggaraan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Politik Dalam Negeri dan

Organisasi Kemasyarakatan. Total anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.1.036.352.851,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp.1.036.352.851,- (100%). Pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik capaian kinerja 100% (sangat tinggi). Dalam pencapaian Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik ini telah dilaksanakan penyaluran bantuan keuangan kepada 13 Partai Politik.

6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dilakukan melalui 1 Kegiatan dan 3 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Total anggaran setelah perubahan adalah sebesar Rp.97.041.171,- dan terealisasi sampai triwulan II sebesar Rp.25.426.500,- (26,20%)- Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial capaian kinerja 75% (sedang). Dalam pelaksanaan program ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memfasilitasi kasus dengan mengeluarkan sebanyak 6 rekomendasi. Kasus yang banyak difasilitasi adalah kasus/ konflik sosial.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2022.

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan Triwulan II Tahun 2023

No	Program	Anggaran APBD 2023	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
		(Rupiah)	(Rupiah)	(%)	Kategori	(%)	Kategori
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.310.907.101	1.696.866.616	75	S	51,25	R
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0	0	73,6	S	0	SR
3.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	0	73,33	S	0	SR
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	25	SR	0	SR
5.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.036.352.851	1.036.352.851	100	ST	100	ST
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	97.041.171	25.426.500	75	S	26,20	SR

Berdasarkan tabel RKPD sampai dengan triwulan II Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkinerja **Sangat Rendah** dengan nilai perangkat kinerja **48%**.

Hasil evaluasi menemukan beberapa permasalahan untuk menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain:

- a. Kegiatan yang melibatkan Tim (Forkopimda) adalah kesibukan dari personil Tim sehingga ada beberapa jadwal temu ramah antara personil tim dengan pemuka masyarakat belum dapat terlaksana.
- b. Untuk capaian kinerja Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan masih sangat rendah (25%), hal ini disebabkan karena masih kurangnya Ormas di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki inisiatif atau keinginan untuk mendaftarkan Ormasnya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memiliki nomor registrasi di Kemenkumham.

3.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II, Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-PD secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja OPD dapat cepat diketahui.
- b. Kepala OPD hendaknya lebih menata strategi dalam pengendalian pelaksanaan / pemantauan dan evaluasi pada Organisasi Perangkat kerjanya.
- c. Setiap KPA dan PPTK perlu upaya ekstra agar capaian kinerja program dan kegiatan dapat tercapai lebih cepat sesuai dengan target dalam dokumen perencanaan daerah/perangkat daerah.

- d. Dalam pengisian tabel pada Laporan RKPD selalu berkoordinasi dengan Bapedalitbang.
- e. Dalam metodologi pengukuran kinerja tidak semua realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik,. Diharapkan ada tabel yang memuat metologi pengukuran kinerja yang mana jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESIRIS SELATAN
Priode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab	
															I		II		III		IV								
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		6,952,625,756		6,011,801,859		4,444,301,123		770,324,340		1,988,231,627						2,758,645,967		8,458,444,962		122%		
		8	01				BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		6,952,625,756		6,011,801,859		4,444,301,123		770,324,340		1,988,231,627						2,758,645,967		8,458,444,962		122%		
1.	Sasaran 1: Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100%	3,533,240,524	20%	3,452,914,377	20%	3,310,907,101	5%	761,509,919	5%	935,266,697					10%	1,696,866,616	30%	5,149,780,993	30%	146%	
		8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	100%	35,076,038	20%	38,124,300	20%	39,462,850	5%	10,502,100	5%	5,765,500					10%	16,267,600	30%	54,391,900	30%	155%	
		8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	35,076,038	4 Dokumen	38,124,300	4 Dokumen	39,462,850	1 Dokumen	10,502,100	1 Dokumen	5,765,500					2 Dokumen	16,267,600	6 Dokumen	54,391,900	30%	155%	
		8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,426,711,391	20%	2,479,582,529	20%	2,378,781,127	5%	439,715,603	5%	760,155,768					10%	1,199,871,371	30%	3,679,453,900	30%	152%	
		8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/Bulan	2,265,790,507	308 Orang/ Bulan	2,343,019,021	308 Orang/Bulan	2,264,301,127	62 Orang/ Bulan	431,655,603	65 Orang/ Bulan	748,065,768					127 Orang/ Bulan	1,179,721,371	435 Orang/Bulan	3,522,740,392	28%	155%	
		8	01	01	2.01	02	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	160,920,884	12 Dokumen	136,563,508	12 Dokumen	114,480,000	3 Dokumen	8,060,000	3 Dokumen	12,090,000					6 Dokumen	20,150,000	18 Dokumen	156,713,508	30%	97%	
		8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85%	115,762,500	17%	14,000,100	17%	7,700,000	-	0	-	0					-	0	17%	14,000,100	20%	12%	
		8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	115,762,500	8 Orang	14,000,100	13 Orang	7,700,000	-	0	-	0					-	0	8 Orang	14,000,100	27%	12%	

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab					
								(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %														
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)	
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	85%	334,498,030	17%	284,301,110	17.00%	416,653,419	4.25%	159,852,712	4.25%	93,082,100					8.50%	253,024,812	25.50%	537,325,922	30%	161%		
		8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	44 Paket	12,078,190	12 Paket	10,319,900	8 Paket	27,667,661	8 Paket	27,654,882	-	-					8 Paket	27,654,882	20 Paket	37,974,782	45%	314%	
		8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	27,386,753	8 Paket	28,520,280	4 Paket	22,347,608	2,5 Paket	14,462,030	1,25 Paket	6,988,000					3,75 Paket	21,450,030	11,75 Paket	49,970,310	49%	182%	
		8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	36,909,696	8 Paket	22,783,500	4 Paket	27,224,150	1 Paket	7,112,550	1 Paket	2,862,250					2 Paket	9,974,800	10 Paket	32,758,300	42%	89%	
		8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	12,744,294	2 Dokumen	3,170,000	1 Dokumen	1,800,000	-	150,000	-	450,000					-	600,000	2 Dokumen	3,770,000	33%	30%	
		8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	22,725,765	2 Laporan	10,258,500	1 Laporan	7,700,000	-	3,234,000	-	462,000					-	3,696,000	2 Laporan	13,954,500	33%	61%	
		8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	222,653,332	2 Laporan	190,432,000	1 Laporan	329,914,000	-	107,329,250	-	82,319,850					-	189,649,100	2 Laporan	380,081,100	33%	171%	
		8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	85%	204,216,047	17%	104,314,000	17.00%	166,947,308	4.25%	95,660,000	4.25%	11,047,973					8.50%	106,707,973	25.50%	211,021,973	30%	103%	
		8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	44 Unit	150,491,250	35 Unit	59,228,000	10 Unit	33,744,000	5 Unit	20,340,000	3 Unit	11,047,973					8 Unit	31,387,973	43 Unit	90,615,973	98%	60%	
		8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	60 Unit	53,724,797	15 Unit	45,086,000	23 Unit	133,203,308	11 Unit	75,320,000	-	0					11 Unit	75,320,000	34 Unit	120,406,000	57%	224%	
		8	01	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	100%	209,778,673	20%	168,378,188	20%	225,322,201	5%	32,968,459	5%	47,916,412					10%	80,884,871	30%	249,263,059	30%	119%	
		8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	33,229,284	2 Laporan	17,378,188	1 Laporan	32,430,104	0	1,700,378	0	5,909,412					0	7,609,790	2 Laporan	24,987,978	33%	75%	

No	Sasaran	Kode Rekening					Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab			
									(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			(11)		(12)
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
		8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	176,549,389	2 Lapora n	151,000,000	1 Laporan	192,892,097	0	31,268,081	0	42,007,000					0	73,275,081	2 Laporan	224,275,081	33%	127%			
		8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	85%	207,197,845	17%	364,214,150	17%	76,040,196	4.25%	22,811,045	4.25%	17,298,944					8.50%	40,109,989	26%	404,324,139	30%	195%			
		8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	116,514,132	3 Unit	89,044,150	1 Unit	36,900,000	-	19,024,550	-	12,314,000					-	31,338,550	3 Unit	120,382,700	43%	103%			
		8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	116,514,132	0	0	5 Unit	29,740,196	1 Unit	3,036,495	1 Unit	2,914,944					2 Unit	5,951,439	2 Unit	5,951,439	10%	5%			
		8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit	3,820,163	18 Unit	2,970,000	10 Unit	9,100,000	5 Unit	750,000	2 Unit	2,070,000					7 Unit	2,820,000	25 Unit	5,790,000	42%	152%			
		8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	86,863,550	2 Unit	272,200,000	2 Unit	300,000	-	-	-	-					-	-	2 Unit	272,200,000	33%	313%			
2	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Masyarakat yang Meningkatkan Wawasan Kebangsaannya	500 Orang	379,663,891	500 Orang	144,119,338	500 Orang	0	116 Orang	0	120 Orang	0					236 Orang	0	736 Orang	144,119,338	147%	38%			
		8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Penyelenggaraan Pendidikan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	105 Upacara	379,663,891	19 Upacara	144,119,338	21 Kali	0	-	0	6 Upacara	0					6 Upacara	0	25 Upacara	144,119,338	24%	38%			

No	Sasaran	Kode Rekening					Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab	
															(1)	(2)	(3)					(4)							(5)
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)	
		8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	2500 Orang	379,663,891	500 Orang	144,119,338	500 Orang	0	-	0	236 Orang	0					236 Orang	0	736 Orang	144,119,338	29%	38%	
3.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pemahaman Politik di Kalangan Masyarakat/ Aparatur Daerah Serta Terciptanya Stabilitas Politik Pemerintahan yang Kondusif di Daerah	85%	1,401,596,150	17%	1,122,588,361	17%	1,036,352,851	4.25%	0	4.25%	1,036,352,851					8.50%	1,036,352,851	25.5%	2,158,941,212	30%	154%	
		8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik, Pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah	10 Laporan	1,401,596,150	2 Lapora n	1,122,588,361	2 Laporan	1,036,352,851	-	-	1 Laporan	1,036,352,851					1 Laporan	1,036,352,851	3 Laporan	1,122,588,361	30%	80%	
		8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130 Orang	1,284,510,624	26 Orang	1,093,463,351	26 Orang	1,036,352,851	0	0	26 Orang	1,036,352,851					26 Orang	1,036,352,851	52 Orang	2,129,816,202	40%	166%	

No	Sasaran	Kode Rekening					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah D an Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab		
									(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)			(11)	
									Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
			8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan	117,085,526	2 Lapora n	29,125,010	2 Laporan	0	-	0	1 Laporan	0					1 Laporan	0	3 Laporan	29,125,010	30%	25%	
4.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri		8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Orams yang Melaksanakan Aktivitas Sesuai Regulasi	83 Ormas	206,802,598	17 Ormas	77,020,250	63 Ormas	0	3 Ormas	0	-	0					3 Ormas	0	20 Ormas	77,020,250	24%	37%	
			8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas/LSM yang Memiliki Legalitas	83 Ormas	206,802,598	17 Ormas	77,020,250	63 Ormas	0	3 Ormas	0	-	0					3 Ormas	0	20 Ormas	77,020,250	24%	37%	
			8	01	04	2.01	06	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	10 Laporan	206,802,598	2 Lapora n	77,020,250	2 Laporan	0	-	0	1 Laporan	0					1 Laporan	0	3 Laporan	77,020,250	30%	37%	
5.	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri		8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Hasil Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85%	573,013,307	13%	90,863,276	17%	0	-	0	8.50%	0					8 5%	0	22%	90,863,276	25%	16%	
			8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Pencegahan dan Pengawasan Pekat	30 Kali	573,013,307	6 Kali	90,863,276	-	0	-	0	-	0					-	0	6 Kali	90,863,276	20%	16%	

No	Sasaran	Kode Rekening					Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab	
															I		II		III		IV								
															(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %							
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320 Orang	462,935,774	530 Orang	36,436,718	64 Orang	0	-	0	40 Orang	0			40 Orang	0	570 Orang	36,436,718	178%	8%			
		8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Laporan	110,077,533	2 Laporan	54,426,558	2 Laporan	0	-	0	1 Laporan	0			1 Laporan	0	3 Laporan	54,426,558	30%	49%			
6	Sasaran 3: Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik yang ditangani	100%	858,309,286	20%	1,124,296,257	20%	97,041,171	5%	8,814,421	5%	16,612,079			10%	25,426,500	30%	1,149,722,757	30%	134%			
		8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Rekomendasi Penanganan Konflik yang diindak Lanjuti	100%	858,309,286	20%	1,124,296,257	20%	97,041,171	5%	8,814,421	5%	16,612,079			10%	25,426,500	30%	1,149,722,757	30%	134%			
		8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300 Orang	696,195,601	615 Orang	1,060,557,450	60 Orang	0	65 Orang	0	30 Orang	0			95 Orang	0	710 Orang	1,060,557,450	237%	152%			

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)(Output)	Target Kinerja Renstra PD pada Tahun 2026	Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		SKPD Penang gung Jawab									
								I		II		III		IV				(13)			14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %						
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		14 = 7 +13		15 = 14/6 X 100 %		(16)
								Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	% (Rp.)		
		8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10 Laporan	86,868,060	2 Laporan	63,738,807	2 Laporan	0	-	0	1 Laporan	0					1 Laporan	0	3 Laporan	63,738,807	30%	73%	
		8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	75,245,625	0	0	2 Laporan	97,041,171	-	8,814,421	1 Laporan	16,612,079					1 Laporan	25,426,500	1 Laporan	25,426,500	13%	34%	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA																								48%	87%				
PERINGKAT KINERJA																								SR	T				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:								:																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:								:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:								:																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya:								:																					

Painan, Juni 2023

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Pesisir Selatan


HARDI JARMA PUTRA, SH, M.Si
NIP. 19670901 198602 1 001